

Resistensi Koalisi Organisasi Non-Pemerintah untuk Keamanan Pangan dan Hayati terhadap Program Penanaman Benih Transgenik Monsanto di Indonesia

by

Aswin Baharuddin¹

Abstract

This study set in a polemic that surfaced for the first time when genetically modified seeds (GMO seeds) commercialized in Indonesia in 2001. Government of Indonesia's (Ministry of Agriculture) choice to improve national agricultural productivity through collaboration with Monsanto is reaping a massive protest from the Non-Government Organization (NGO) which concern with environmental conservations issues. This NGOs coalition called NGO Coalition for Biological Diversity and Food Safety. This planting GM seeds Program is fail and stopped by the government in 2003. This study concluded and found the successful of NGO Coalition in advocating this issue is caused by three important factors. First, NGOs Coalitions success to formulate and spread critical discourse about this program. The second factor is NGO coalition success in mobilizing support and resource from various stakeholders such as NGOs, Ministry of Environment, Scientists and international networks. The third is the discovery of the role of collective identity as the party that articulates the interests of farmers and the environment in shaping and maintaining solidarity actors involved or collaborated in this Coalition.

Keyword: *NGO Coalition for Biological Diversity and Food Safety, Hegemony, Collective Identity, Genetically Modified Organism (GMO), Monsanto.*

Pendahuluan

Penelitian ini bermaksud menganalisa aktifitas Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dalam merespon kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Monsanto, perusahaan multinasional dalam bidang bioteknologi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian

¹ Penulis adalah Dosen Tetap di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin

nasional melalui penanaman benih hasil rekayasa genetika (benih transgenik) milik Monsanto. Kerjasama ini kemudian menuai penolakan oleh berbagai Ornop yang *concern* terhadap isu pelestarian lingkungan hidup.

Program penanaman benih transgenik ini di banyak negara juga direspon dengan protes oleh berbagai kelompok Ornop. Penolakan tersebut diantara berlangsung di negara-negara Eropa, India, Filipina, dan Thailand. Program ini ditolak dibanyak negara setidaknya karena tiga alasan. Pertama, benih transgenik ini akan menciptakan organisme baru yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua adalah hasil dari benih transgenik tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah benih transgenik ini masuk kedalam kategori gen terminator atau gen yang tidak bisa dibudidayakan, yang artinya setiap kali ingin menanam petani harus membeli benih baru. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan tergantungnya petani pada penyedia benih ini.

Di Indonesia, saat pertama kali didatangkan, benih transgenik milik Monsanto pada komoditas kapas dimaksudkan untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas pertanian kapas yang bahkan tak mampu memenuhi 1 persen kebutuhan kapas nasional.² Kedatangan Monsanto dengan teknologi pertaniannya ini seperti angin segar bagi pemerintah. Hal serupa juga terjadi pada petani yang belum cukup terinformasi perihal benih transgenik ini, mereka kemudian tertarik pada besarnya jumlah hasil panen yang dijanjikan oleh pemerintah dan Monsanto.

Benih transgenik Monsanto sudah mulai diujicobakan di Indonesia sejak akhir 1998 dan bisa dikomersialisasikan pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 107/ Kpts/ KB.403/2/2001. Sejak uji coba dilakukan berbagai Ornop telah meresponnya dengan berbagai protes hingga akhirnya terbentuk Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan (selanjutnya akan disebut Koalisi Ornop). Koalisi Ornop ini diinisiasi oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), ICEL (*Indonesian Center for*

² M. Basyir Nappu, dkk. 2004. "*Pengembangan Kapas Non-Transgenik di Sulawesi Selatan*", dalam *Jurnal Litbang Pertanian*. 23 (1) tahun 2004.

Environmental Law), KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia), dan PAN (*Pesticide Action Network*) Indonesia. Koalisi yang akhirnya semakin besar berkat dukungan dari 67 Lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia.³

Penolakan Koalisi Ornop ini kemudian membuahkan hasil pada tanggal 1 Desember 2003 saat Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penghentian komersialisasi benih kapas transgenik milik Monsanto di Sulawesi Selatan. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa aktor non-negara seperti Ornop juga dapat berpengaruh dalam jalannya kerjasama perdagangan antara negara (pemerintah) dan perusahaan multinasional. Lebih dalam lagi melalui fenomena ini kita dapat melihat bagaimana Ornop memiliki sikap tersendiri dalam merespon pilihan pembangunan yang ditempuh pemerintah. Dua hal tersebut menunjukkan betapa Ornop benar telah menjadi salah satu aktor penting dalam studi pembangunan.

Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas maka dibutuhkan teori yang mampu menjelaskan bagaimana Ornop mampu menyebarkan gagasan-gagasan tentang alasan penolakannya sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak lain untuk mendukungnya. Teori yang akan digunakan adalah hegemoni dan *counter hegemony*, teori ini digunakan karena pada dasarnya ada pertarungan gagasan dan wacana antara Ornop dengan Pemerintah dan Perusahaan Multinasional dalam upaya mewujudkan tujuannya masing-masing. Dan dalam proses pertarungan tersebut Ornop berada dalam posisi yang menyajikan wacana tandingan atas wacana *mainstream* yang disebarkan oleh Pemerintah dan Perusahaan Multinasional. Berikut penjelasan tentang teori *counter hegemony*.

³"Kronologi benih kapas transgenik Bt di Indonesia"
<http://www.beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0011&ikey=3> , diakses pada 10 desember 2011.

1. Hegemoni dan *Counter Hegemony*

Teori hegemoni yang diajukan oleh Antonio Gramsci merupakan teori yang mencoba menyampaikan gagasan tentang cara melakukan kontrol sosial politik yang sudah tidak memadai lagi jika hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Karenanya Gramsci memberi penekanan pada pentingnya kontrol dengan menggunakan ide. Menurut Gramsci, agar dapat mempertahankan kuasanya, penguasa harus membuat yang dikuasai menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa menjadi norma mereka. Sehingga, yang dikuasai mengaffirmasi posisi mereka sebagai subordinasi dari yang berkuasa.⁴

Hegemoni ini didudukkan sebagai dengan metode penguasaan yang lain yakni dominasi. Dominasi merupakan cara mempertahankan kekuasaan dengan menjadikan kekuatan fisik atau koersi sebagai mediumnya. Sedangkan Hegemoni adalah hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi atau dengan kata lain hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.⁵

Kehadiran teori ini harus kita baca dengan melihat salah satu posisi teoretik dalam tradisi Marxis yang menganggap suprastruktur (aspek non ekonomi seperti ideologi dan budaya) merupakan refleksi dan atau ditentukan oleh struktur (aspek ekonomi). Teori Hegemoni Gramsci ini merespon posisi teoretik tersebut dan mengajukan premis bahwa aspek non-ekonomi memiliki bukan sekedar refleksi dan memiliki peran yang penting.⁶

Penekanan Gramsci terhadap aspek-aspek ideasional ini merupakan upayanya untuk memberi penjelasan atas keberhasilan kapitalisme bertahan meski ada kontradiksi inheren dalam dirinya. Posisi teoretik seperti ini pula yang membuat Gramsci berupaya melengkapi analisa tentang perubahan sosial yang ditawarkan oleh kaum marxis yang menjadikan aspek ekonomi sebagai fokus utamanya. Oleh karena itu, menurut Kurtz, teori hegemoni Gramsci ini

⁴ Muhadi Sugiono. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 31

⁵ Roger Simon. 2001. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, cetakan ketiga (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan Insist Press. Hal. 20

⁶ Muhadi Sugiono. *Op.Cit.* Hal. 34-35

merupakan upaya menjembatani jurang antara struktur dan suprasruktur.⁷

Kalau dalam rangka mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan fisik atau koersi, penguasa mempertahankannya melalui “masyarakat politik”, yakni, institusi seperti tentara, polisi, pengadilan dan birokrasi pemerintahan maka untuk mempertahankan kekuasaannya secara konsensual sangat bergantung pada kemampuannya mengatur “masyarakat sipil” atau apparatus transmisi yang berperan sangat signifikan dalam pembentukan kesadaran massa. Aparatus-aparatus tersebut seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain-lain.⁸

Melalui masyarakat sipil inilah penguasa melakukan upaya-upaya politis, kultural dan intelektual untuk menguniversalkan pandangan dan kepentingan partikular mereka kepada pihak yang dikuasai. Masyarakat sipil ini pulalah yang mampu menjadi wadah bagi kelompok-kelompok sosial yang tersubordinasi dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif atau hegemoni tandingan yang kemudian kita sebut sebagai *counter hegemony*.⁹

Penjelasan tentang begitu sentralnya aspek ideasional di atas-lah yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana program penanaman benih transgenik Monsanto di Sulawesi Selatan diupayakan untuk diterima oleh khalayak utamanya petani karena dianggap berdasar pada kepentingan bersama. Dan juga sebaliknya bagaimana gagasan dari program ini coba dinegasikan oleh kelompok lain agar tidak begitu saja diterima oleh khalayak.

Wadah yang dimaksud tersebut kemudian dijelaskan sebagai blok historis atau aliansi dari berbagai kekuatan sosial berbeda yang disatukan secara politis oleh seperangkat ide-ide hegemonik. Ide-ide tersebut merupakan pandangan dunia yang berdasar pada kepentingan bersama. Blok historis dan Ide-ide tersebut kemudian diproduksi dan diuniversalisasi oleh kelompok yang disebutnya intelektual organik. Intelektual organik adalah setiap intelektual yang

⁷ *Ibid.* Hal. 33

⁸ *Ibid.* Hal. 34-35

⁹ Roger Simon. *Op.Cit.* Hal. 28

kehadirannya terkait dengan struktur produktif dan politik masyarakat.¹⁰ Terkait tema penelitian ini, maka masyarakat sipil dengan ide-ide yang berdasar pada kepentingan bersama yang dimaksud mewajah dalam koalisi Ornop yang menolak program pemerintah yang bekerjasama dengan Monsanto.

Upaya Ornop dalam menyajikan hegemoni tandingan juga diteorisasikan oleh Mansour Fakih yang meneliti peran Ornop dalam kaitannya dengan diskursus pembangunan di Indonesia. kehadiran Ornop dengan diskursus pembangunan alternatif menurut Fakih merupakan gerakan kontra hegemonik. Peran Ornop dalam menyajikan wacana tandingan ini merupakan proses pendidikan untuk menciptakan ruang bagi kemunculan kesadaran kritis. Bagi Fakih, upaya tersebut merupakan prakondisi bagi transformasi sosial.¹¹

Teorisasi Fakih tersebut sangat cocok untuk digunakan dalam topik penelitian ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah aktor yang dimaksud Fakih sama dengan penelitian ini yakni Ornop. Lebih lanjut upaya Ornop untuk melakukan *counter hegemony* melalui pendidikan dan penyajian diskursus tandingan terkait visi pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah tersebut secara substansi serupa dengan yang terjadi pada koalisi Ornop yang menolak program pemerintah. Karena pada dasarnya program penanaman benih transgenik yang menurut koalisi Ornop berbahaya bagi lingkungan dan manusia sesungguhnya adalah manifestasi dari cara pandang atau visi pemerintah tentang pembangunan.

Melalui paparan teoretik di atas maka dalam penelitian ini teori *counter hegemony* akan digunakan untuk membedah visi sekaligus metode kampanye Ornop dalam menolak program penanaman benih transgenik di Indonesia. Ornop dituntut untuk menghadirkan wacana tandingan terkait benih transgenik yang publikasi pendukungnya dilakukan secara massif oleh pemerintah dan korporasi. Dengan teori ini, kita dapat melihat bagaimana wacana tentang manfaat dari perkembangan teknologi pertanian yang dibawa oleh perusahaan multinasional direspon oleh Ornop dengan perspektif yang berbeda. Dan

¹⁰ Muhadi Sugiono. *Op.Cit.* Hal. 42-44

¹¹ Mansour Fakih. *Op.Cit.* Hal. 60-66

bagaimana Wacana yang membuat diskursus tentang benih hasil rekayasa genetika secara kritis akan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan petani ini berupaya diuniversalisasi oleh koalisi Ornop.

2. *Collective Identity*

Selain menghadirkan wacana tandingan sehingga dapat memperoleh dukungan yang luas, Ornop juga dituntut untuk dapat mempertahankan dan menjaga solidaritas koalisi mereka. Untuk menganalisa bagaimana Ornop bertahan dan bagaimana proses menjaga dan mengembangkan solidaritas dalam koalisi ini akan digunakan teori *collective identity* atau identitas kolektif. Teori ini diperlukan mengingat koalisi Ornop ini bertahan cukup lama dalam upayanya menolak penanaman benih transgenik di Indonesia. Sehingga kita membutuhkan penjelasan mengenai apa yang menjadi perekat dari Ornop ini sehingga dapat menjaga soliditas internal mereka. Berikut penjelasan mengenai teori *collective identity*.

Penjelasan mengenai teori ini salah satunya diajukan oleh Alberto Melucci yang berpendapat bahwa identitas kolektif adalah proses pembentukan sebuah sistem aksi. Identitas kolektif ini merupakan hasil dari interaksi dan gagasan bersama yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok tentang orientasi sebuah aksi serta peluang dan tantangan pelaksanaan aksi tersebut. Berinteraksi dan berbagi itulah yang membuat Melucci mendefinisikan identitas kolektif sebagai sebuah proses. Karena melalui hal tersebut identitas kemudian dikonstruksi dan dinegosiasikan.¹²

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Porta dan Diani, yang mengatakan bahwa identitas kolektif juga bisa terbentuk berdasar pada tujuan-tujuan, nilai-nilai, perilaku, paradigma dan cara hidup serta pengalaman aksi bersama. Terkadang, identitas menjadi sangat eksklusif dan mengesampingkan berbagai bentuk identifikasi yang lain tetapi justru lebih sering identitas dioperasikan inklusif dan beragam, seperti individu yang merasa memiliki

¹² Hank Johnston dan Bert Klandermans (ed.). *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Hal. 44-45

kedekatan dengan beberapa identitas kolektif.¹³

Dari kedua penjelasan di atas, dapat kita tangkap bahwa identitas kolektif ini terbangun dari kesamaan tujuan dan cara pandang. Dia dibangun dengan pretensi menjadi sebuah sistem aksi bersama. Dalam penelitian ini upaya membangun identitas kolektif didasari pada tujuan yang sama yakni kepedulian terhadap petani serta terancamnya eksistensi lingkungan dan manusia yang dibahasakan oleh koalisi Ornop sebagai upaya melindungi Keamanan Hayati dan Pangan.

Yang juga penting dari penjelasan di atas adalah bahwa identitas kolektif yang dibangun bukan berarti mengurung individu atau kelompok kedalam sebuah identitas tunggal. Itu terjadi karena setiap individu dan kelompok dapat memiliki kedekatan dengan beberapa identitas yang berbeda. Hal itu sangat bergantung pada visinya terhadap suatu permasalahan sosial yang mereka hadapi. Dalam konteks penolakan Ornop terhadap program penanaman benih transgenik ini, penjelasan di atas akan sangat membantu untuk menganalisa mengapa banyak Ornop yang fokusnya bukan pada Keamanan Hayati dan Pangan juga terlibat aktif dalam koalisi.

Kemuculan teori ini merupakan buah dari ketidakpuasan atas teori berbasis rasionalitas seperti teori mobilisasi sumber daya. Teori mobilisasi sumber daya ini dianggap tidak memadai lagi untuk menjelaskan gerakan-gerakan feminisme, environmentalisme, perdamaian dan gerakan otonomi lokal. Dibandingkan dengan teori mobilisasi sumber daya yang memusatkan rasionalisme dan materialisme, teori ini mengurai pertanyaan seputar integrasi dan solidaritas kelompok yang terlibat aksi kolektif. Yang artinya teori ini memberi perhatian pada aspek non-materialistik dan ekspresif.¹⁴

Menurut Cohen, aksi-aksi tersebut dengan sadar berjuang melawan kekuasaan untuk secara sosial menciptakan identitas baru dan menciptakan ruang demokratis bagi aksi sosial otonom. Lebih lanjut Cohen memaparkan bahwa yang dibutuhkan untuk menganalisa gerakan sosial adalah mencari

¹³ Donatella Della Porta dan Mario Diani. *Op.Cit.*

¹⁴ Rajendra Singh. 2010. *Gerakan Sosial Baru* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Resist Book. Hal. 144-145

serangkaian kondisi, faktor dan kekuatan pendorong yang digunakan para aktor-aktor kolektif untuk menciptakan identitas dan solidaritas serta bagaimana itu semua dipertahankan. Selain itu, juga penting untuk mendiagnosa hubungan antara musuh-musuh dengan isu-isu dalam konflik. Dan agar dapat mengenali latar sosial dan budaya aksi kolektif sebagaimana kondisi dan kekuatan pendorong ini membentuk dan menghasilkan perenungan dan kesadaran para aktor dalam situasi kongkrit aksi kolektif dan gerakan sosial.¹⁵

Pemaparan cara analisa yang diajukan Cohen inilah yang juga akan digunakan untuk menganalisa proses terbentuknya Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan sejak saat diinisiasi hingga proses integrasi dan solidaritas terbangun. Mulai dari visi yang sama tentang kemanan lingkungan dan manusia hingga relasinya dengan pemerintah dan perusahaan multinasional. Hal tersebut akan dibahas dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih baru dengan isu benih transgenik ini.

Dari kedua pembicaraan teoretik di atas dapat kita tangkap bahwa dalam gerakan sosial aktor-aktornya dapat menggalang dukungan dari pihak lain dengan memenangkan pertarungan gagasan atau membuat ide-idenya disepakati. Sedangkan dari teori yang kedua kita dapat memperoleh penjelasan bahwa dalam gerakan sosial aktor-aktornya dapat terintegrasi dan membangun solidaritas karena terbentuknya identitas kolektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu sosial yang bersifat deskriptif dan berupaya untuk menginterpretasi sebuah fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan mencoba mencari data dan informasi secara mendalam melalui sumber tertulis dan wawancara. Data tersebut akan dianalisa dengan mempelajari konteks atau situasi sosial fenomena tersebut sehingga dapat menjelaskan dan menyajikan data-data yang dibutuhkan secara

¹⁵ *Ibid.*

utuh.¹⁶

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yakni wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian ini. Wawancara telah dilakukan kepada tiga orang aktivis yang aktif dalam Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan. Ketiga aktivis itu adalah Hira Jhamtani, Tejo Wahyu Jatmiko, dan Ida Ronauli. Hasil wawancara dengan ketiga aktivis tersebut dilampirkan dalam penelitian ini. Sementara Telaah Dokumen yang dimaksudkan adalah berbagai data yang dikumpulkan dari jurnal, buku, data-data dari internet serta dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan topik ini.

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan diorganisasikan sesuai dengan polanya masing-masing. Data ini kemudian akan dianalisis sesuai dengan kerangka dan alur pikir serta metode penelitian yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini akan dipetakan data-data tentang konteks pengembangan benih transgenik secara global, pemetaan aktor dalam polemik pengembangan benih transgenik ini baik secara global maupun di Indonesia.

Counter Hegemony oleh Koalisi NGOs terhadap Monsanto dan Pemerintah Indonesia

Hegemoni pada dasarnya adalah metode penguasaan atau pencapaian tujuan dengan menggunakan ide atau gagasan. Hegemoni ini dilakukan dengan membuat kepentingan dan perspektif suatu pihak diinternalisasi oleh pihak yang dikuasai sebagai kepentingan dan cara pandangnya sehingga pihak yang dikuasai secara tidak sadar ikut memperjuangkan kepentingan pihak yang menguasai mereka.

Hal ini dapat kita lihat dari sikap salah satu kelompok petani yakni Asosiasi Petani Kapas Indonesia (Aspekindo) yang berkeras untuk segera

¹⁶ Lisa Harison. 2007. Metodologi Penelitian Ilmu Politik (terjemahan). Jakarta: Penerbit Kencana. Hal.86-88

menanam benih transgenik di lahan mereka. Bahkan, kelompok petani ini juga secara terbuka menyampaikan kepada Koalisi Ornop agar tidak merintangi terlaksananya program ini. Wacana tentang program penanaman benih transgenik ini sebagai jalan bagi petani menuju kesejahteraan secara aktif dan massif disebar oleh anak perusahaan Monsanto, penyuluh pertanian pemerintah serta pemerintah daerah yang bersangkutan.

Persetujuan dan dukungan tersebut dapat diperoleh koalisi dengan menyajikan wacana tandingan terhadap wacana-wacana *mainstream* tentang benih transgenik yang disajikan oleh Pemerintah dan Perusahaan Multinasional. Upaya Koalisi Ornop untuk memenangkan pertarungan gagasan ini adalah bentuk *counter hegemony* atas kekuatan dominan yakni Pemerintah dan Perusahaan Multinasional. Upaya menhadirkan hegemoni tandingan ini dilakukan oleh Koalisi Ornop dengan berupaya mengajukan wacana yang membuktikan bahwa program ini hanyalah didasarkan oleh kepentingan sempit Monsanto. Upaya tersebut juga sekaligus menunjukkan posisi Koalisi Ornop yang mencoba mengajukan gagasan yang mengartikulasikan kepentingan petani dan lingkungan hidup.

Wacana tandingan yang diajukan oleh Koalisi Ornop untuk merebut simpati dan membangun pemahaman kritis petani dan publik tentang Program penanaman benih transgenik ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Pertama adalah wacana yang mengemukakan tentang risiko program ini bagi eksistensi manusia dan lingkungan. Wacana yang kedua adalah wacana seputar ketidakadilan dalam program ini bagi petani. Berikut penjelasan tentang kedua wacana tersebut.

Risiko Program Penanaman Benih Transgenik Monsanto bagi Eksistensi Manusia dan Lingkungan

Wacana tentang risiko bagi eksistensi manusia dan lingkungan yang disebarluaskan oleh Koalisi Ornop meliputi risiko penggunaan benih transgenik, riwayat implikasi bisnis Monsanto (sebagai pihak yang membawa benih transgenik ini ke Indonesia) terhadap manusia dan lingkungan, serta tidak

sesuainya program ini dengan kaidah Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pertama adalah wacana tentang penggunaan benih transgenik bagi manusia dan lingkungan. Wacana ini dipaparkan dengan menggunakan justifikasi dari kalangan ilmuwan yang *concern* pada permasalahan ini. Potensi dampak di atas juga dikemukakan oleh Pakar bioteknologi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Hari Hartiko. Menurut Hari Hartiko masuknya tanaman transgenik ke alam akan membawa dampak negatif pada keragaman hayati dan lingkungan secara luas. Itu terjadi akibat berubahnya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hal ini berpotensi menghilangkan organisme tertentu dalam ekosistem.¹⁷

Kedua yakni riwayat implikasi bisnis Monsanto terhadap manusia dan lingkungan hidup. *Monsanto Chemical Company* adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang ahli kimia yakni John Francis Queeny pada tahun 1901. Perusahaan asal Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat ini memulai bisnisnya dengan memperkenalkan kepada warga AS teknik fabrikasi sakarin atau gula tiruan yang sebelumnya dikembangkan di Jerman. Pada tahun 1920-an, Monsanto berkembang dan telah menjadi salah satu penghasil asam sulfur dan produk industri yang paling besar.¹⁸ Memasuki tahun 1940-an hingga akhir tahun 2000an, perusahaan ini terus memproduksi produk seperti *polystyrene*, *polychlorobiphenyles* atau PCB, herbisida 2,4,5-T hingga *agent orange* yang terindikasi dan terbukti memiliki implikasi buruk bagi lingkungan dan manusia. Sejarah Monsanto yang dipenuhi oleh daftar panjang produk-produk yang terbukti merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia ini juga terus disebarluaskan oleh Koalisi Ornop sebagai bahan pertimbangan bagi petani dan para pihak terkait agar lebih teliti dalam melihat upaya Monsanto untuk memasarkan produk-produknya di Indonesia. Termasuk segmen bisnis baru yang ditekuninya yakni benih transgenik.

¹⁷ Hari Hartiko dalam Hira Jhamtani. 2001. *Ancaman Globalisasi & Imperialisme Lingkungan*. Yogyakarta: INSISTPress dan Jakarta: Konphalindo. Hal. 2-3

¹⁸ Isabelle Delforge. 2005. *Dusta Industri Pangan: Penelusuran Jejak Monsanto (terj.)*. Yogyakarta: INSISTPress. Hal. 32

Ketiga, wacana tentang program ini bertentangan dengan kaidah Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). Salah satu capaian penting dalam KKH adalah komitmen untuk membuat sebuah kesepakatan internasional tentang prosedur pengamanan untuk transfer dan penggunaan organisme hasil rekayasa genetika. Prosedur ini kemudian mawadah dalam Protokol Cartagena yang disepakati pada 29 Januari 2000 di Montreal. Protokol inilah yang menjadi salah satu dasar aktivitas Koalisi Ornop dalam menolak program penanaman benih transgenik di Sulawesi Selatan.

Salah satu prinsip yang paling banyak disorot adalah prinsip kehati-hatian. Koalisi Ornop menjelaskan bahwa pelepasan dan komersialisasi benih transgenik di Sulawesi Selatan ini dilaksanakan tanpa adanya kepastian ilmiah. Menurut Koalisi Ornop ujicoba dan uji kelayakan benih yang dilakukan oleh pemerintah sama sekali tidak memadai dan belum cukup untuk memberi kepastian bahwa benih transgenik tersebut tak akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia.

Keempat adalah wacana tentang berbahayanya pelaksanaan program ini karena melanggar prosedur regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati secara aktif juga membentuk wacana bahwa program penanaman benih transgenik ini melanggar prosedur hukum nasional. Wacana ini dibangun untuk meng-*counter* wacana yang dibangun oleh Pemerintah dan Perusahaan Multinasional bahwa program ini telah melalui prosedur yang diatur dalam hukum nasional Indonesia. Untuk menghadapi wacana tersebut Koalisi Ornop membangun wacana bahwa keputusan pemerintah melalui Surat keputusan Menteri Pertanian No.107/Kpts/KB.430/2/2001 bertentangan dengan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dampak Program Penanaman Benih Transgenik Monsanto terhadap Petani

Permasalahan ketidakadilan yang berpotensi muncul akibat pelaksanaan program ini yang pertama adalah dapat menyebabkan ketergantungan petani atas benih transgenik milik Monsanto. Sementara yang kedua adalah seputar

monopoli hak paten beragam benih transgenik yang dilakukan oleh Monsanto. Selanjutnya, yang ketiga adalah wacana tentang ketidakadilan terhadap Negara berkembang terkait regulasi yang melegalkan perdagangan benih transgenik ini secara global. Berikut penjelasan mengenai kedua hal tersebut.

Pertama, dari beberapa dampak yang telah disebutkan di atas, dampak sosioekonomi yang paling menonjol dari benih transgenik adalah risiko yang dikandung benih transgenik terkaitnya jenisnya sebagai benih “terminator”. Teknologi ini dipatenkan oleh *Delta and Pine Land Company* bersama Departemen Pertanian AS pada tahun 1998. Teknologi terminator adalah suatu bentuk teknologi rekayasa genetika dimana benih hasil panen tidak dapat berkecambah untuk masa panen selanjutnya karena telah dimandulkan.¹⁹ Dampak teknologi ini mengakibatkan erosi genetik di berbagai kawasan atau sistem pertanian termasuk pusat-pusat keanekaragaman hayati. Selain itu juga meningkatkan kerentanan sistem pertanian akibat keseragaman budidaya termasuk hilangnya nilai tradisional akibat tersingkirnya pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal.²⁰

Kedua adalah tentang potensi ketidakadilan yang muncul akibat monopoli paten benih transgenik yang dilakukan oleh Monsanto. Bisnis yang paling mutakhir yang dirambah oleh Monsanto benih yang telah direkayasa secara genetika. Sejak tahun 1984, di kota Saint Louis di Amerika Serikat, Monsanto telah membuka sebuah pusat penelitian berupa 250 laboratorium dan 26 rumah kaca yang digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian bioteknologi. Monsanto telah menciptakan anak-anak perusahaan, mengikat aliansi-aliansi, dan membuat *joint-venture* dengan puluhan perusahaan dan pusat-pusat penelitian. Misalnya, Perusahaan *Flamel Technologies* di Perancis telah menjadi mitra Monsanto pada tahun 1998 untuk pengembangan suatu formula *roundup* yang lebih baik. Di India, perusahaan *Rallis India* telah menandatangani sebuah perjanjian dengan *Cargill Seeds* (saat ini Monsanto), untuk mendistribusikan benih dan herbisida Monsanto ditengah jaringan-

¹⁹ Hesty Widayanti dan Ika N. Krishnayanti. 2003. *Bioteknologi: Imperialisme Modal dan Kejahatan Globalisasi*. Yogyakarta: INSISTPress dan Jakarta: Konphalindo. Hal. 51

²⁰ *Ibid.*

jaringannya yang kuat dengan 3000 pedagang dan 30.000 lokasi penjualan.²¹

Kita dapat menemukan anak perusahaan Monsanto atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengannya di Finlandia, Zimbabwe, Argentina, Ukraina, Afrika Selatan, dan China. Di Indonesia sendiri ada dua perusahaan yang berafiliasi dengan Monsanto yakni Pt. Monagro Kimia dan Pt. Branitha Sandhini. Kedua perusahaan inilah yang kemudian aktif menyalurkan produk dan melaksanakan program-program Monsanto di Indonesia.²²

Upaya Monopoli ini tentunya akan sangat berbahaya karena akan membuat Monsanto menjadi memiliki kuasa yang begitu besar dalam struktur pertanian global. Ini akan menjadi ancaman bagi Negara-negara dunia karena akan menggantungkan hulu dari sektor pertaniannya pada satu perusahaan Multinasional yang akan sulit terkontrol. Wacana inilah yang disebarkan oleh Koalisi ORNOP untuk membangun perlawanan atas Monsanto dengan benih transgeniknya yang mencoba memperluas pasarnya ke Indonesia.

Ketiga, ketidakadilan terkait regulasi yang melegalkan perdagangan benih transgenik secara global. Perundingan mengenai TRIPs telah dimulai sejak tahun 1986 bersamaan dengan usulan perluasan agenda GATT. Perundingan yang berlangsung selama tujuh setengah tahun ini diikuti oleh 123 negara. Sejak awal perundingan di Punta del Este ini telah menuai banyak kontroversi soal perluasan mandat GATT. Agenda perluasan mandat yang diusulkan oleh kelompok Negara-negara maju tersebut mendapat perlawanan dari Negara-Negara Dunia Ketiga. Pada perdebatan tersebut, salah satu poin dari agenda perluasan yang melibatkan kedua pihak di atas adalah perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual melalui kerangka TRIPs. pemberlakuan aturan ini membawa 2 persoalan utama, khususnya bagi Negara berkembang. Pertama sistem perlindungan HaKI ini lebih berpihak dan menguntungkan para pemegang paten yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan multinasional dan merugikan konsumen serta pengguna teknologi. Dan kedua adalah akan menimbulkan ketergantungan dari Negara-negara berkembang terhadap alih

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Hal. 6

teknologi dari negara-negara maju.

Hal tersebutlah yang membuat Koalisi Ornop mengungkapkan ketidaksepatannya sekaligus mengajukan wacana bahwa regulasi ini merupakan perangkat global yang melegalkan komodifikasi atas kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh aktivis Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan Tejo Wahyu Jatmiko dan Ida Ronauli *“Regulasi TRIPs yang diratifikasi dan diterima begitu saja oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi Indonesia secara lebih luas ini memang membawa banyak masalah. Diantaranya adalah soal hak eksklusif sebuah produk atau penemuan melalui paten. regulasi TRIPs juga memberi celah bagi komodifikasi atau paten terhadap organisme. Ini merupakan paten atas makhluk hidup dan sekaligus “komodifikasi atas kehidupan”. Ini tentunya ditolak karena organisme sama sekali bukan hasil ciptaan manusia dan pemanfaatannya tidak boleh dimonopoli oleh satu atau beberapa pihak saja.”*²³

Wacana kritis atau tandingan di atas disebarluaskan oleh Koalisi NGOs melalui beberapa metode. Selain disebarluaskan melalui publikasi masing-masing Ornop yang menjadi anggota Koalisi melalui terbitan dan *website* masing-masing, wacana-wacana yang telah disebutkan di atas disebarluaskan oleh melalui beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah melalui Media atau Kalangan Pers, Gugatan Hukum, Mobilisasi Massa, serta melalui Pendidikan dan Pendampingan kepada Petani. Berikut penjelasan mengenai metode-metode tersebut. Upaya menggalang dan memperluas jejaring koalisi untuk membuat gelombang penolakan menjadi lebih besar dilakukan dengan bekerjasama dengan aktor-aktor seperti Ornop, Ilmuwan dan kalangan kampus, kalangan pemerintahan (Kementerian Lingkungan hidup) dan Jejaring Internasional. Bagian ini akan menjelaskan secara lebih spesifik mengapa dan bagaimana koalisi dan jejaring dengan masing-masing aktor di atas bisa digalang.

Peran Identitas Kolektif dalam Membentuk dan Menjaga Solidaritas Koalisi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa identitas

²³ Wawancara dengan Tejo W. Jatmiko dan Ida Ronauli pada 18 Juli 2012 (Lihat Lampiran 1).

kolektif dikonstruksi dari sebuah tujuan dan cara pandang yang sama. Identitas kolektif ini kemudian mendasari sebuah sistem aksi dari sebuah gerakan tertentu. Karenanya sebagai teori ini akan digunakan untuk membedah bagaimana solidaritas gerakan Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan dibangun dan dipertahankan. Secara lebih spesifik lagi pada bagian ini akan dijelaskan apa yang membuat Ornop dalam Koalisi ini merasa memiliki tujuan yang sama. Lebih lanjut juga akan dijelaskan apa yang mendorong Ornop dalam koalisi ini memilih isu benih transgenik ini sebagai isu bersama yang harus mereka respon. Yang terakhir akan dijelaskan apa yang menyebabkan Ornop-Ornop dalam koalisi ini merasa merekalah aktor yang harus mengadvokasi permasalahan ini.

Tuntutan Koalisi Ornop kepada Pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam terkait program penanaman benih transgenik di Sulawesi Selatan dalam konteks yang lebih luas sebenarnya dapat kita baca sebagai visi Koalisi Ornop yang berupaya mengkoreksi visi dan metode pembangunan pemerintah yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan pembangunan. Ini terlihat ketika pemerintah berupaya meningkatkan produktifitas pertanian nasional melalui penggunaan bioteknologi modern seperti benih hasil rekayasa genetika. Sementara di tempat lain Koalisi Ornop mengkritisnya karena program penanaman benih transgenik ini dianggap sangat berisiko bagi lingkungan dan manusia dan tidak adil bagi petani.

Keberpihakan Koalisi Ornop terhadap petani dan lingkungan ini terbangun dari kesamaan tujuan dan cara pandang Ornop yang menginisiasi dan bergabung dalam koalisi ini. Koalisi ini diprakarsai oleh Konphalindo, sebuah organisasi yang fokus pada pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Lalu Koalisi ini pada awalnya terbentuk atas kerjasama dengan Ornop yang juga fokus pada lingkungan hidup meski dengan spesifikasi yang berbeda yakni ICEL, PAN Indonesia dan YLKI. ICEL merupakan Ornop yang fokus pada isu pembangunan berkelanjutan dengan memberikan berbagai alternatif produk hukum atau kebijakan yang berkeadilan lingkungan. Sementara PAN Indonesia merupakan Ornop yang berkampanye tentang bahaya penggunaan pestisida bagi lingkungan

dan manusia. Yang terakhir adalah YLKI, merupakan Ornop yang berkampanye untuk menimbulkan kesadaran kritis pada konsumen akan hak dan kewajiban agar dapat melindungi diri dan lingkungannya.

Permasalahan benih transgenik ini direspon oleh Koalisi Ornop juga karena posisi Indonesia sebagai negara yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati. Posisi tersebut membuat risiko penanaman benih transgenik terhadap lingkungan di Indonesia menjadi lebih besar. Itu terjadi karena benih hasil rekayasa genetika tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi membuat punah berbagai ragam tanaman yang kalah bersaing dengan benih transgenik tersebut. Ornop yang secara geografis berada di Indonesia ini memiliki tanggung lebih untuk dengan serius mengkampanyekan risiko benih transgenik terhadap lingkungan.

Selain kedua hal yang telah dijelaskan di atas, Koalisi Ornop muncul sebagai aktor yang menolak program penanaman benih transgenik ini karena program ini merupakan program yang diajukan oleh pemerintah dan perusahaan multinasional. Di posisi lain petani sebagai pihak paling awal yang akan bersinggungan dan terkena dampak oleh penanaman ini sama sekali belum memiliki sumber informasi alternatif selain dari pemerintah dan Monsanto. Dalam kondisi seperti ini peran Ornop menjadi sangat dibutuhkan untuk muncul sebagai aktor yang menyajikan cara pandang alternatif terkait isu ini. Kesemua hal tersebut terbangun melalui sebuah proses dialog terus menerus antar Ornop dalam Koalisi ini.

Dari pemaparan di atas dapat kita tangkap bahwa identitas kolektif ini terbangun oleh beberapa hal. Yang pertama Kesamaan tujuan dan cara pandang atas permasalahan pembangunan dan kondisi lingkungan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai Negara kaya akan keanekaragaman hayati yang terancam dengan program penanaman benih transgenik ini juga menjadi salah satu faktor pendorong koalisi Ornop begitu serius mengadvokasi permasalahan ini. Yang terakhir adalah Ornop menjadi pihak penting untuk merespon pelaksanaan program ini karena petani belum terinformasi secara berimbang sementara program ini diajukan oleh pemegang otoritas kebijakan dan perusahaan

multinasional memiliki sumber daya lebih. Hal-hal inilah yang melatari terbangunnya identitas kolektif Koalisi Ornop sebagai pihak yang bekerja untuk Keamanan Hayati dan pangan sehingga Koalisi ini dapat terbentuk dan solidaritas antara Ornop dapat terbangun.

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perdebatan seputar program penanaman benih transgenik di Sulawesi Selatan ini kedua pihak, Monsanto sebagai pendukung dan Koalisi Ornop untuk Keamanan Pangan dan Hayati sebagai penentang, masing-masing berupaya meyakinkan petani dan publik melalui pembentukan wacana. Pada awalnya, program ini tetap berlangsung meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan seperti Ornop dan Ilmuwan karena Monsanto dan Kementerian Pertanian mampu membuat petani dan publik menerima cara pandang mereka bahwa tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan kata lain, petani dan publik telah menginternalisasi cara pandang dan kepentingan Monsanto dan Kementerian Pertanian menjadi cara pandang dan kepentingan mereka. Inilah menjadi jawaban mengapa petani pada awal pelaksanaan program ini ikut memperjuangkan terlaksananya program ini.
2. Pada kutub yang berbeda, Koalisi Ornop untuk Keamanan Pangan dan Hayati sebagai motor dari pihak yang menentang merespon kondisi ini dengan melakukan *counter hegemony* atas Monsanto dan Kementerian Pertanian melalui penyebaran wacana tandingan. Wacana yang diajukan oleh Koalisi Ornop adalah wacana tentang risiko pelaksanaan program ini bagi eksistensi manusia dan lingkungan dan wacana seputar ketidakadilan atas petani dalam program ini. Keseluruhan wacana tersebut berupaya untuk memberikan pengetahuan kritis bagi petani dan publik bahwa pelaksanaan program ini pada dasarnya hanya berdasar

pada kepentingan sempit Monsanto dan sangat berisiko bagi petani, publik, dan lingkungan. Dalam advokasinya ini Koalisi Ornop berupaya untuk menyajikan cara pandang alternatif tentang pembangunan pertanian yang didasari oleh kepentingan petani dan lingkungan. Cara pandang tersebut menegaskan cara pandang Monsanto dan Kementerian Pertanian yang dianggap abai atas petani dan lingkungan.

3. Menghadapi Monsanto dan Kementerian Pertanian yang memiliki sumber daya melimpah dalam menyebarkan wacananya tentang program ini, Koalisi Ornop dituntut untuk mengembangkan koalisi dan jejaring kerjasama dengan berbagai kalangan. Hal tersebut dilakukan oleh Koalisi Ornop dengan memobilisasi dukungan dari Ornop (yang fokusnya bukan seputar petani dan lingkungan hidup), ilmuwan, dan jejaring internasional untuk menolak program ini. Melalui ilmuwan dan jejaring internasional ini pula-lah Koalisi Ornop mendapat berbagai justifikasi ilmiah tentang argumen-argumen yang mereka ajukan untuk menolak program ini.
4. Selain menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk menolak program penanaman benih transgenik di Sulawesi Selatan, Koalisi Ornop juga dituntut untuk menjaga solidaritas dalam internal koalisi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa solidaritas dalam koalisi dapat terbentuk dan terjaga dalam kurun waktu yang cukup lama karena terbangunnya sebuah identitas kolektif sebagai pihak yang mengartikulasikan kepentingan petani dan lingkungan hidup. Identitas kolektif tersebut terbangun dari visi dan pengalaman aksi pihak-pihak dalam koalisi yang memang *concern* terhadap isu-isu seputar lingkungan hidup. Identitas kolektif ini pula-lah yang membuat Koalisi Ornop dapat dengan mudah memobilisasi dukungan dari ilmuwan dan jejaring internasional.
5. Program ini akhirnya dihentikan pada bulan Desember 2003 setelah hasil panen benih transgenik di Sulawesi Selatan rendah dan tidak merata. Kondisi tersebut secara drastis merubah sikap petani yang semula mendukung menjadi sebaliknya. Kegagalan program ini memenuhi

janjinya terkait kesejahteraan petani dan komitmen terhadap isu pelestarian lingkungan inilah yang mengakselerasi gelombang penolakan yang digalang oleh Koalisi Ornop menjadi semakin besar dan solid. Perubahan sikap petani dan semakin besarnya besar dan solidnya Koalisi Ornop inilah yang akhirnya membuat pemerintah menghentikan program ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Bebbington, Anthony J., dkk. (ed.). 2008. *Can NGOs Make a Difference?: The Challenge of Development Alternatives*. London: Zed Books.
- Clark, John. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi ORNOP di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.
- Delforge, Isabelle. 2005. *Dusta Industri Pangan: Penelusuran Jejak Monsanto* (terj.). Yogyakarta: INSISTPress.
- Eldridge, Philip J. 1995. *Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour. 2008. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* cetakan keempat (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hadiwinata, Bob S. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London: RoutledgeCurzon.
- Hadiz, Vedi R. dan Daniel Dhakidae (ed.). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia.
- Harison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Ilmu Politik* (terjemahan). Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ho, Mae-Wan. 2008. *Rekayasa Genetik: Impian atau Petaka* (terj.). Yogyakarta: INSISTPress.
- Jatmiko, Tejo Wahyu (ed.). 2005. *Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba: Risiko Rekayasa Genetik di Pertanian* (terj.). Jakarta: Konphalindo.
- Jhamtani, Hira. 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPress.
- _____. 2001. *Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan*. Yogyakarta: INSISTPress, Penerbit Pustaka Pelajar dan KONPHALINDO
- Johnston, Hank dan Bert Klandermans (ed.). *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: PostMarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (terjemahan). Yogyakarta: Resist Book.
- Mirsel, Robert. 2006. *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2002. *Imperialisme Abad 21* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Porta, Donatella Della dan Mario Diani. 2006. *Social Movements: An Introduction (second edition)*. USA: Blackwell Publishing.
- Rahman, Meuthia Ganie-. 2002. *An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto's New Order*. Jakarta: LabSosio.
- Simon, Roger. 2001. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, cetakan ketiga (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru* (terjemahan). Yogyakarta: Resist Book.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Demokratis (1966-2001)* (terj.). Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Suryajaya, Martin. 2011. *Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme*. Yogyakarta: Penerbit Resist.
- Uhlir, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (terj.). Yogyakarta: Penerbit Mizan.
- Wermasubun, D. Savio dan Ike Dian Puspita (ed.). 2007. *Advokasi Malpraktek Bisnis: Pengalaman Masyarakat Sipil Indonesia*. Surakarta: The Bussiness Watch Indonesia.
- Widayanti, Hesty dan Ika N. Krishnayanti (peny.). 2003. *Bioteknologi: Imperialisme Modal dan Kejahatan Globalisasi*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Widjajanto, Andi dkk. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. 2007. Yogyakarta: Penerbit LKis.

Yaziji, Michael dan Jonathan Doh. 2009. *NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*. UK: Cambridge University Press.

Jurnal

Nappu, M. Basyir, dkk. 2004. "Pengembangan Kapas Non-Transgenik di Sulawesi Selatan", dalam Jurnal Litbang Pertanian. 23 (1) tahun 2004.

Hadiwinata, Bob Sugeng. 2005. "Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 9, Nomor 1, Juli 2005

Dokumen

Ida Ronauli dan Tejo W. Jatmiko. *Kronologis Komersialisasi Kapas Transgenik Bt di Indonesia* (Dokumen Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan)

Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya: Pelajaran Berharga dari Penanaman Benih transgenik di Indonesia (Dokumen Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan)

Website

<http://beritabumi.or.id/> , diakses pada 10 desember 2011

<http://www.ylki.or.id/> , diakses pada 10 desember 2011

<http://www.indonesiaorganic.com/> , diakses pada 10 desember 2011

<http://www.icel.or.id/> , diakses pada 10 desember 2011